

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON JAMAAH
UMRAH AKIBAT PERAMPASAN ASET OLEH
NEGARA**

T E S I S

Oleh:

I KADEK NOVA ADI WIJAYA KUSUMA

202020251012



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

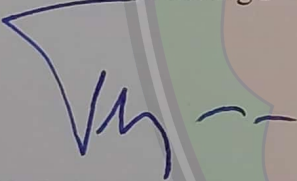
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah
Akibat Perampasan Aset Oleh Negara
Nama Mahasiswa : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251012
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 13 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.
NIDN 0304065402


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Akibat
Perampasan Aset Oleh Negara

Nama Mahasiswa : I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251012

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2022

Jakarta, 23 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

Penguji I

: Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph. D.

NIDN. 0307078203

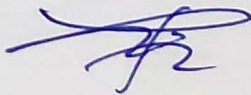
Penguji II

: Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIP. 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Akibat Perampasan Aset Oleh Negara”**, ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 23 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma
NPM. 202020151012

ABSTRAK

I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma, 202020252012. Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Akibat Perampasan Aset oleh Negara.

Dalam putusan Majelis Hakim dalam persidangan, dapat memuat tiga bentuk tindakan terhadap barang bukti, yaitu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak atasnya, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Rumusan masalah dalam Tesis ini, mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel dan perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastasaan) dengan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel yaitu tidak mencerminkan keadilan hukum bagi pihak calon jamaah umrah dikarenakan tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan sebagaimana Negara harus hadir dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, tetap tidak mendapat perlindungan hukum dikarenakan permohonan kasasi pihak Jaksa ditolak Hakim Mahkamah Agung. Upaya yang telah dilakukan calon jamaah umrah dengan mengajukan gugatan ganti rugi tetapi tidak diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri. Sehingga, upaya kedepannya agar tidak terjadi lagi hal yang sama, meningkatkan pengawasan terhadap PPIU dimulai dari izin perusahaan sampai dengan jamaah umrah pulang dari menunaikan ibadah umrah.

Kata Kunci: Aset, Perlindungan Hukum, Umrah

ABSTRACT

I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma, 202020252012. *Legal Protection for Candidates for Umrah Pilgrims Due to the Seizure of Assets by the State.*

In the decision of the Panel of Judges in the trial, it can contain three forms of action against the evidence, namely the evidence is returned to the party entitled to it, the evidence is confiscated for the state, and the evidence is confiscated to be destroyed or damaged as regulated according to the provisions of Article 46 of the Law. Criminal Procedure Code (KUHAP). The formulation of the problem in this thesis, regarding the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 which confiscated PT First Travel's assets and legal protection for prospective Umrah pilgrims PT First Travel who was unable to go for Umrah based on the Supreme Court's Decision Number 3096 K/ Pid.Sus/2018. This thesis uses a normative legal research method (library) with secondary data which is then analyzed qualitatively to obtain conclusions about the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 which confiscates PT First Travel assets, which does not reflect legal justice for the parties involved. prospective Umrah pilgrims because they do not get compensation and do not provide legal protection for victims of fraud as the State must be present in providing guarantees, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law. Legal protection for prospective Umrah pilgrims of PT First Travel who cannot go for Umrah based on the Supreme Court's Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018, still does not get legal protection because the prosecutor's cassation application was rejected by the Supreme Court Judge. Efforts have been made by prospective Umrah pilgrims by filing a claim for compensation but the lawsuit was not accepted by the District Court. Thus, future efforts to prevent the same thing from happening again are to increase supervision of the PPIU starting from the company's permit until the Umrah pilgrims return from performing the Umrah pilgrimage.

Keywords: *Assets, Legal Protection, Umrah*

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Akibat Perampasan Aset oleh Negara”**. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan pembimbing teknis dalam penulisan Tesis ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. yang telah membantu dan menyetujui usulan judul Tesis penulis.
4. Bapak Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si, CTA., selaku dosen pembimbing materi dalam penulisan Tesis ini terimakasih atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak I Nyoman Dangin, S.Pd dan Ibu Ni Nyoman Budiasih tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga Tesis ini selesai.
7. Istri penulis tercinta Ni Kadek Novy Kardiyan, Amd.Kg dan Anak penulis tercinta Putu Naura Belvia Karina Wijaya D serta Kadek Noah Gavino Bhara Wijaya D.

8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan Tesis dan teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat langsung dan tidak langsung

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 23 Juli 2022



I Kadek Nova Adi Wijaya Kusuma



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	9
1.3.Rumusan Masalah	10
1.4.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	11
1.5.1. Kerangka Teori.....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	17
1.6.Metode Penelitian	18
1.7.Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Perusahaan Pelaksana Jasa Umroh di Indonesia..	22
2.2.Pengaturan Pelaksanaan Jasa Umrah	24
2.2.1. KUHPer.....	24
2.2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	25
2.2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	29

2.3. Tanggung Jawab Perusahaan Pelaksanaan Jasa Umrah	32
2.4. Ruang Lingkup Penyitaan Benda/Barang	34
2.4.1. Pengertian Penyitaan	34
2.4.2. Benda/Barang yang Disita.....	35
2.4.3. Batasan Benda/Barang yang Disita.....	38
BAB III	
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
NOMOR 3096K/PID.SUS/2018 YANG MERAMPAS	
ASET PT. FIRST TRAVEL	
3.1. Fakta Hukum Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 3096K/Pid.Sus/ 2018 yang Merampas	
Aset PT First Travel	40
3.1.1. Kronologis.....	40
3.1.2. Putusan Majelis Hakim	44
3.2. Akibat Hukum Perampasan Aset-aset PT. First	
Travel Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 3096K/Pid.Sus/2018	60
BAB IV	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON JAMAAH	
UMRAH PT FIRST TRAVEL YANG TIDAK DAPAT	
BERANGKAT UMRAH BERDASARKAN PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3096K/PID.SUS/2018	
4.1. Meningkatkan Pengawasan Terhadap	
Badan Usaha Penyelenggaraan Pemberangkatan	
Ibadah Umrah.....	66
4.2. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Putusan	
Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018	81
BAB V	
PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101